

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Kurdi merupakan suatu kelompok etnis atau sekelompok orang Indo-Eropa (Indo European tribes) yang menempati beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan Eurasia yang disebut Kurdistan. Sebelum Perang Dunia I, Kurdistan terbagi di dua wilayah, yakni wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Ottoman dan wilayah Kerajaan Persia. Setelah Perang Dunia I, Kurdistan terbagi dalam 5 negara yakni Turki, Irak, Iran dan Suriah (Nawawi Lubis, 2014).

Secara keseluruhan pada tahun 2002 populasi suku kurdi sebesar 28 juta jiwa. Terbagi di Turki 15 juta, Iran 6 juta, Irak 5 juta, Suriah 1 juta, serta Azerbaijan dan Armenia 1 juta jiwa (Kiblat, 2014). Di Irak sendiri populasi mayoritas Kurdi terdapat di tiga provinsi di timur laut Irak yaitu Dohuk, Erbil, dan Sulaymaniyah, yang juga disebut sebagai Kurdistan.

Suku Kurdi di Timur Tengah merupakan kelompok etnis terbesar keempat. Bangsa Kurdi berjumlah sekitar 15% hingga 20% dari 37 juta jiwa populasi masyarakat Irak. Akan tetapi selama beberapa dekade terakhir mereka menghadapi tekanan yang brutal oleh pemerintah dan mereka juga tidak pernah mendapatkan status bangsa yang permanen (BBC, 2017).

Suku Kurdi merupakan suku yang berasal dari bangsa Medes yang masuk ke Parsi pada tahun 614 SM sampai 550 SM. Suku Kurdi sendiri merupakan etnis yang relatif tua, akan tetapi kesadaran mereka terhadap wilayah yang mereka tempati sebagai tempat mereka tinggal baru muncul belakangan ini karena konsekuensi atas hidup nomaden yang berpindah-pindah sembari berternak dan bertani. Ketika batas-

batas wilayah negara mulai ditetapkan, pada saat tersebut mulai muncul kesadaran akan wilayah bagi suku Kurdi,

mereka terdesak dan terpaksa harus meninggalkan pola hidup tradisional dan memulai hidup menetap. Suku Kurdi sendiri memiliki bahasa kurdi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka yakni Kurmanji dan Sorani/kurdi (Sihbudi, 1991).

Konflik Etnis Kurdi dengan Irak terdiri dari berbagai perang dan pemberontakan oleh Etnis Kurdi terhadap otoritas Irak selama abad ke-20, setelah kekalahan kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I (Yildiz, 2004).

Konflik pertama terjadi ketika runtuhnya Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1918 yang membangkitkan harapan etnis Kurdi di Irak untuk memiliki negara mereka sendiri. Mereka memulai mencari tanah air untuk mendirikan negara. Akan tetapi, mereka harus menerima kekecewaan yang pahit ketika penjajah Inggris masuk ke beberapa daerah Mesopotamia yang juga meliputi Irak. Masuknya penjajahan Inggris tersebut menghambat aspirasi mereka untuk tinggal di negara mereka sendiri tanpa menjadi bangsa kelas dua. Kenyataan pahit terjadi ketika negara Irak berdiri dan etnis kurdi harus rela membagi tempat mereka dengan Irak, yang hal serupa juga dialami oleh etnis Kurdi di Iran, Suria, dan Turki (Sluglett, 1976).

Sejarah berdirinya Kurdish Region Government (KRG) bermula ketika Sheikh Mahmoud Barzinji menjadi gubernur Suleimaniyyah pada tahun 1918 dibawah pemerintahan Inggris. Barzinji dan pemimpin Kurdis lainnya ingin pemerintahan Kurdistan memerintah secara independen dari Baghdad melawan Inggris (Stansfield, 2006).

Sebelum terpilihnya Barzinji sebagai gubernur Suleimaniyyah, etnis Kurdi terbagi menjadi dua kubu. Yang

dimana terdapat mereka yang pro-Ottoman dan mereka yang pro-Inggris. Oleh karena Sheikh Mahmoud Barzinji merupakan tokoh yang terkemuka dan sosok ideal yang mampu menjaga Mosul, Inggris mengirimkan perwira politik pertama Mayor E. M. Noel sebagai negosiator dengan pemimpin-pemimpin Kurdi untuk menunjuk Sheikh Mahmoud Barzinji sebagai wakil Inggris di Suleimaniyyah (Stansfield, 2006).

Setahun setelah pengangkatan, Mahmoud Barzinji beranggapan bahwa ia telah memiliki wewenang atas semua Kurdi dan memerintahkan tentara suku Kurdi menangkap semua personil Inggris di Suleimaniyyah. Akan tetapi, Inggris merespon cepat dengan mengirimkan perwira politik baru yaitu Mayor E. B. Soane dan tidak lama setelah itu Mahmoud Barzinji diturunkan pada Juni 1919 (Stansfield, 2006).

Setelah Mahmoud Barzinji diturunkan, sheikh Kurdi Ahmed Barzani mulai aktif menentang pemerintahan Irak selama 1920-an. Pemberontakan Pertama Ahmed Barzani terjadi pada tahun 1931 dan tidak berhasil sehingga menyebabkan dia berlindung di Turki.

Kemudian upaya separatis yang kedua pada tahun 1943 dilakukan oleh saudara Ahmed Barzani, yaitu Mustafa Barzani. Pemberontakan ini juga gagal dilakukan sehingga Mustafa Barzani diasingkan ke Iran karena berpartisipasi dalam upaya pembentukan Republik Kurdi di Mahabad. Kembalinya Mustafa Barzani dari pengasingan pada tahun 1958, upaya negosiasi dengan pemerintah baru Irak Jenderal Qasim terkait otonomi Kurdi kembali dilakukan. Negosiasi gagal dan mengakibatkan perang Irak-Kurdi pertama terjadi pada September 1961 sampai 1970 (DeRouen Jr & Heo, 2007).

Pada tahun 1974 upaya penyelesaian konflik terus dilakukan dengan harapan pemberian otonomi Kurdi di Irak

Utara dilakukan, upaya negosiasi gagal dan menghasilkan perang Irak-Kurdi yang kedua serta mengakibatkan runtuhnya milisi kurdi dan dikuasainya Irak utara oleh pemerintah Irak. Mustafa Barzani dan pemimpin Kurdistan Democratic Party (KDP) lainnya melarikan diri ke Iran, sementara itu Patriotic Union of Kurdistan (PUK) mengambil alih kekuasaan dan memimpin kampanye pemberontakan terhadap pemerintah Irak (Mongilong, 2014).

Sejak tahun 1976 hubungan PUK dan KDP memburuk, keadaan ini memuncak ketika pasukan PUK menderita kekalahan besar oleh KDP yang menerima dukungan dari angkatan udara Iran pada April 1978. Pada periode ini, otoritas Ba'athis mengambil kesempatan untuk melakukan pemindahan kekuasaan dan kolonisasi dengan skala besar di Irak utara, hal ini bertujuan untuk mengubah demografi dan menstabilkan kekuasaan (Mongilong, 2014).

Beberapa tahun kemudian banyak konflik besar kembali terjadi. Seperti pada tahun 1988 Pemerintah Irak melakukan kampanye genosida terhadap warga sipil Kurdi. Pembantaian secara masal ini mengakibatkan pemindahan secara paksa ratusan ribu penduduk, penangkapan dan pemenjaraan secara ekstrim terhadap ribuan wanita, anak-anak dan orang tua serta sekitar 2.000 desa yang ekonomi dan infrastrukturnya dihancurkan, termasuk rumah, sekolah, masjid dan lainnya (Human Rights Watch, 1993).

Kemudian tahun 1988 pesawat tempur Irak menjatuhkan senjata kimia di Halabja yang merupakan kota kecil di daerah perbatasan timur laut Irak dengan Iran yang menewaskan hampir 5.000 warga sipil (Human Rights Watch, 1991). Krisis kemanusiaan tersebut mengakibatkan Amerika, Inggris dan Prancis mendeklarasikan zona larang terbang di daerah tersebut.

Pada tahun 2003, Peshmerga angkatan bersenjata resmi Kurdistan bertempur mengusir tentara Saddam Hussein dari Irak utara bersama pasukan Amerika dan merebut kota-kota penting termasuk ibukota mereka, Kirkuk. Akan tetapi Kurdi meninggalkan Kirkuk tak lama setelah itu karena atas permintaan Amerika (Gollard, 2014).

Sejak tahun 2003, Amerika Serikat berusaha menggulingkan pemerintahan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Setelah Saddam Hussein tersingkirkan, pada tahun 2005 Irak berusaha menata kembali pemerintahannya dan memberikan otonomi bagi wilayah bangsa Kurdi. Kemudian berdirilah pemerintahan KRG yang dipimpin oleh Presiden Massoud Barzani. KRG memiliki bendera nasional sendiri dan juga memiliki angkatan bersenjata yang bernama Peshmerga. (Kholidi, 2016).

Pada tahun 2005, Kurdistan Regional Government (KRG) melakukan referendum kemerdekaan pertama. Referendum ini dilakukan dengan alasan karena KRG menginginkan penentuan nasib sendiri, selain itu KRG memandang perlakuan Irak terhadap warga dan wilayah Kurdistan tidak sama dengan warga dan wilayah bagian Irak lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Politisi Kurdi, bahwa anggaran yang dibayarkan Irak pada wilayah Kurdistan tidaklah cukup (Al Jazeera , 2014).

Referendum pada tahun 2005 dilakukan secara informal oleh organisasi sipil KRG yang menghasilkan sekitar 95% vote suara memilih kemerdekaan dan mendukung terbentuknya negara merdeka (Park, 2012). Setelah referendum diadakan, pada tanggal 30 Januari 2005 Irak dan KRG mengadakan kesepakatan untuk memberikan otonomi daerah secara *de facto* kepada KRG yang berarti bahwa KRG berstatus *proto-state* (Hasan, 2017).

Pada 25 September 2017 referendum Kurdistan kembali dilaksanakan untuk menentukan nasib mereka sendiri menjadi negara berdaulat. Tempat dilaksanakannya pemungutan suara tersebar diseluruh wilayah Kurdi di Irak, termasuk Kirkuk yang merupakan wilayah sengketa antara KRG dan Irak (Sofwan, 2017).

Hasil menentukan 2.861.000 pemilih memilih “ya” dan hanya 224.000 memilih “tidak” yang berarti bahwa lebih dari 92% pemilih kembali memilih dukungan terhadap kemerdekaan KRG, suara tersebut diperoleh dari 3,3 juta pemilih yang berlatar belakang etnis Kurdi maupun non-Kurdi. Dari referendum yang dihasilkan diatas secara garis besar rakyat Kurdistan memberikan mandate kepada pemerintah KRG untuk melakukan negosiasi pemisahan diri dari pemerintahan Irak, akan tetapi diselenggarakannya referendum ini mendapat kecaman baik dari Iran, Turki serta dunia internasional (Arungbudoyo, 2017).

Keinginan Kurdistan Regional Government mendirikan negara sudah dapat dikatakan bersyarat, dibuktikan dengan adanya seorang pemimpin, masyarakat, bahasa, dan wilayah, akan tetapi pengakuan dari negara atau masyarakat internasional masih belum didapatkan. Oleh karena itu, munculah upaya-upaya yang dilakukan KRG untuk mendapat pengakuan internasional dengan alasan ingin berdiri diatas kaki sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diambil yaitu : **“Bagaimana Upaya Kurdistan Regional Government (KRG) Irak Untuk Memperoleh Pengakuan Internasional Dalam Mendirikan Negara Berdaulat?”**

C. Kerangka Pemikiran Multi-Track Diplomacy

Multi-track Diplomacy merupakan sebuah kerangka kerja konseptual dalam melihat bagaimana perwujudan perdamaian sebagai cerminan dari berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap proses peace-making dan peace-building di kehidupan internasional (Diamond & McDonald, 1996).

Pada periode sebelumnya, *multi-track diplomacy* hanya terbagi menjadi dua, yaitu jalur pertama yang berupa Government (One Track) dan jalur kedua yang berupa Non-Government (Two Track). Jalur pemerintah dilakukan antara pemerintah suatu negara dengan negara lain, yang bersifat formal seperti perumusan resolusi konflik di dunia internasional. Kemudian pada jalur non-pemerintah, berhubungan dengan urusan-urusan diluar system pemerintahan yang formal seperti permasalahan kelompok atau individu tertentu yang merupakan aktor non-negara (Diamond & McDonald, 1996).

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin lama semakin kompleks maka permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat internasional juga akan semakin kompleks. Munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional, aktor yang berperan dalam kegiatan diplomasi pun tidak lagi tergantung pada diplomat pemerintah yang merupakan aktor diplomasi dalam pemerintahan, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh aktor lain. Oleh karena itu dalam studi hubungan internasional terdapat konsep Diplomasi Multi Jalur (*Mult-Track Diplomacy*) (Muhamad, 2017). Menurut Louise Diamond dan John McDonald keragaman

kegiatan dalam *Multi-Track Diplomacy* terdiri atas sembilan jalur, yaitu :

1. Pemerintah (Government)

Dalam hal ini, pembuatan kebijakan dalam pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi (*official diplomacy*) (Diamond & McDonald, 1996).

2. Non - Government atau *Professional Conflict Resolution*

Jalur ini dikenal juga sebagai *unofficial diplomacy* yang merupakan interaksi non-formal yang dilakukan oleh para profesional seperti akademisi, petinggi-petinggi NGO, aktivis social, maupun *public figure* yang dilakukan secara lebih santai dibandingkan aktor formal (Diamond & McDonald, 1996).

3. Bisnis

Dalam jalur bisnis, diplomasi dilakukan melalui kegiatan komersial untuk menghasilkan keuntungan ekonomi masyarakat dan negara, yang mampu menjadi solusi bagi tekanan ekonomi dan berbagai hal yang menimbulkan konflik sehingga dapat menciptakan perdamaian. Menurut Diamond and McDonald, bisnis merupakan suatu cara yang mampu menciptakan agenda perdamaian. Negosiasi terkait perekonomian, sumber daya serta ketenagakerjaan merupakan upaya diplomatik bisnis internasional yang juga merupakan negosiasi perdamaian secara *de facto* (Diamond & McDonald, 1996).

4. Warga Negara Privat (*Private Citizen*)

Setiap individu didalam suatu negara dapat berkontribusi untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan perdamaian. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan cara citizen diplomacy, organisasi voluntary privat, program pertukaran, NGO maupu berbagai kelompok kepentingan (Diamond & McDonald, 1996).

5. Penelitian, Edukasi dan Pelatihan

Diplomasi melalui jalur ini dapat dilakukan dengan *research*, beasiswa atau pembelajaran yang berhubungan dengan institusi pendidikan, *think tanks* dan berbagai pusat

penelitian kelompok yang memiliki kepentingan khusus. Dengan kata lain, sebuah program pelatihan yang menyediakan keahlian praktisioner yang berperan sebagai negosiasi, mediasi, serta resolusi konflik yang mencakup berbagai aspek global mengenai studi lintas-budaya, konflik analisis, studi tata dunia dan perdamaian, serta manajemen dan resolusi konflik (Diamond & McDonald, 1996).

6. Aktivisme Perdamaian

Perwujudan perdamaian dalam hal ini dilakukan oleh aktivis perseorangan atau organisasi melalui advokasi, dimana lebih menekankan pada isu-isu perdamaian dan lingkungan seperti pelucutan senjata, HAM, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi kelompok terhadap kepentingan khusus mengenai kebijakan-kebijakan tertentu dalam pemerintah (Diamond & McDonald, 1996).

7. Agama

Diplomasi jalur ini dilakukan oleh komunitas keagamaan yang bertujuan untuk menciptakan suasana damai dan menyampaikan kepada dunia bahwa agama dan kepercayaan berlandaskan perdamaian bukan kekerasan bahkan peperangan (Diamond & McDonald, 1996).

8. Pendanaan

Aktor dalam jalur ini berhubungan dengan para filantropis atau komunitas-komunitas funding baik itu yayasan maupun individual yang mampu menyediakan dukungan finansial untuk kegiatan yang berhubungan dengan misi *peacemaking* (Diamond & McDonald, 1996).

9. Komunikasi dan Media

Diplomasi melalui jalur ini merupakan perdamaian melalui informasi yang berhubungan dengan suara rakyat, yang dimana opini publik dapat diekspresikan melalui media cetak, radio, film, sistem elektronik, maupun seni. Media tersebut dapat menjadi sarana edukasi untuk dapat menganalisa isu-isu yang diharapkan mampu mengubah keadaan ketika perspektif buruk terhadap sesuatu yang

terlanjur hadir di masyarakat (Diamond & McDonald, 1996).

Kurdistan Regional Government (KRG) dalam hal ini menggunakan track pertama dan ketiga yaitu melalui pemerintah dan melalui bisnis atau perwujudan perdamaian melalui perdagangan. Pemerintah KRG melakukan berbagai upayah diplomasi dengan Turki, salah satunya upayah yang dilakukan seperti pada bulan Mei 2012 Presiden KRG Masoud Barzani dan PM KRG Nechirvan Barzani menghadiri undangan ke Ankara. Pertemuan ini menghasilkan kontrak mengenai transfer minyak dari KRG ke Turki tanpa adanya pertimbangan dari otoritas pemerintah Irak (Jamilah, Motif Kerjasama Antara KRG (Kurdish Regional Government) Irak dengan Pemerintah Turki (2013-2016), 2018).

Kemudian tanggal 16 November 2013 terjadi pertemuan kembali antara pemimpin dari kedua belah pihak yaitu Perdana Menteri Recep Tayip Erdogan dan Presiden KRG Masoud Barzani di kota Kurdi Diyarbakir. Pertemuan ini menjadi sorotan bagi media, disamping itu pernyataan yang disampaikan Presiden Barzani yang sangat menyorot perhatian adalah : *“Long live Turk-Kurd brotherhood, long live freedom, and long live piece”* (Uras, 2013).

Pada minggu, 26 Februari 2017 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu pemimpin KRG di Istanbul. Pertemuan tertutup ini berlangsung selama satu jam, topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait hubungan ekonomi dan menyelamatkan Mosul dari kelompok terror ISIS. *“Irak penting bagi kita dalam segala hal, baik secara ekonomi, dalam hal keamanan perbatasan dan dalam hal kemanusiaan dan budaya,”* ujar juru bicara Erdogan setelah pertemuan berlangsung (TRT.net, 2017).

Dalam pertemuan kedua belah pihak tidak hanya diadakan di turki, pada sabtu, 16 November 2013 Perdana

Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara. Pertemuan tersebut disaksikan puluhan ribu orang Kurdi dan didampingi oleh pemimpin Kurdi Masoud Barzani di Diyarbakir yang merupakan jantung wilayah Kurdi. Pertemuan “bersejarah” ini dilakukan untuk memulai kembali perdamaian antara Kurdi dan Turki yang sempat mandek. Dalam pertemuan tersebut Erdogan menyerukan untuk mengakhiri konflik yang menyebabkan 45 ribu orang tewas, sementara Barzani berharap pertemuan ini bisa membawa mereka ke meja perundingan kembali (Wardhana , 2013).

Penggunaan track ketiga yaitu melalui pemerintah dan melalui bisnis atau perwujudan perdamaian melalui perdagangan, kerjasama antara KRG dengan Turki sejak tahun 2008 dilakukan dalam beberapa bidang termasuk perdagangan, energy dan keamanan. Ditambah lagi tahun 2012, KRG dan Turki mengadakan kesepakatan untuk membangun sebuah pipa gas dan dua pipa minyak yang menghubungkan langsung KRG (Irak utara) dengan Turki. Kemudian kerjasama lainnya antara KRG dan Turki yaitu kerjasama di bidang keamanan yang menyangkut terorisme. Dalam hal ini dilakukannya pertemuan antara Presiden KRG Barzani dengan PM Turki Yildirim di Ankara pada tanggal 17 November 2016 yang dalam pertemuan tersebut membahas mengenai hubungan kerjasama dalam mengatasi tindakan terorisme (Jamilah, 2018).

Kerjasama antara Amerika juga pernah dilakukan dengan Kurdi. Seperti pada tahun 2003, dalam rangka menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein para pemimpin Kurdi mengambil keputusan krusial dengan membuka wilayah mereka sebagai pangkalan militer Amerika. Amerika dan Kurdi membangun aliansi dalam rangka menyerang Baghdad. Namun, Kurdi tidak diberikan kekuasaan yang besar oleh Amerika karena alasan menghindari konflik etnis di masa

depan. Kurdi hanya diberi tugas sebagai penjaga pos perbatasan dan sebagai pasukan pembersih wilayah (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013).

Setelah pemerintahan Saddam Hussein tumbang Amerika secara tidak langsung menghadiahi Kurdi dengan otonomi khusus konstitusional. Seperti yang tertuang pada pasal 4 dan 113 konstitusi Irak, Kurdistan dinyatakan sebagai wilayah otonomi khusus yang diakui oleh konstitusi yang berisi berbagai kekuasaan istimewa seperti memiliki pasukan sendiri, otoritas kewarganegaraan dan kebijakan luar negeri tanpa batas (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013).

D. Hipotesis

Berdasarkan analisa rumusan masalah dengan menggunakan kerangka pemikiran *Multi-Track Diplomacy* di atas, maka dapat ditarik hipotesa bahwa upaya Kurdistan Regional Government (KRG) Irak untuk memperoleh pengakuan internasional dalam mendirikan negara berdaulat yaitu menggunakan :

10. Track pertama yaitu jalur pemerintah yang dilakukan melalui diplomasi dengan cara menyelenggarakan pertemuan dengan pemerintah Turki, dan
11. Track ketiga yaitu jalur bisnis yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama perdagangan dengan Turki.

E. Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan tema yang akan dibahas, penelitian ini melingkupi rentang waktu Januari 2005 sampai September 2017, dimana pada rentan waktu tersebut terjadi beberapa upaya yang dilakukan KRG untuk memperoleh pengakuan internasional dalam mendirikan negara berdaulat.

F. Metode Penelitian

1. Metodologi Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif (Bakry, 2016), yang dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan upaya yang dilakukan Kurdistan Regional Government (KRG) Irak untuk memperoleh pengakuan internasional dalam mendirikan negara berdaulat.
2. Sumber dan Jenis Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, artikel, koran, dokumen, dan bahan dari internet (Bakry, 2016).
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian (Bakry, 2016).
4. Teknik Analisa Data
Teknik analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati (Bakry, 2016).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut. BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, dan sistematika penulisan. BAB II, merupakan bab yang

menjelaskan transformasi Kurdistan Regional Government (KRG) dari gerakan (movement) menjadi pemerintahan (government) *proto-state*. BAB III, merupakan bab yang menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Kurdistan Regional Government (KRG) untuk memperoleh pengakuan internasional dalam mendirikan negara berdaulat. Dan BAB IV, merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan paparan atau dekripsi fakta-fakta dan saran.